# RENCANA KERJA TAHUN 2021



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

akhirnya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun Anggaran 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam

melaksanakan kinerja di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara cepat,

efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang

kesempurnaan RKT OPD ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang membantu

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Painan, Juni 2020 Repala Dinas

Drs. SUARDI.S, M.Si NIP. 19610324 198603 1 004

17

# **DAFTAR ISI**

# **KATA PENGANTAR**

# **DAFTAR ISI**

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021	8
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN DPMPPTSP	30
BAB IV	:	PENUTUP	40

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahunan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjebatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen RKT sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RKT OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
   Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
   Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
   Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang talah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
   Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
   Selatan Tahun 2016-2021;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
   Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
   Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

#### 1.4 Sistematika

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

# BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021 Berisikan uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

#### BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2021

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

#### BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan 2021, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **BAB II**

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

# 1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019 dengan 7 (tujuh) Program dan 27 (Dua puluh tujuh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.470.715.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.449.598.668,- atau 98.56 % dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki 13 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 610.188.800,- dengan realisasi Rp.602.689.458,- persentase keuangan 98,77 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa lancarnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

# a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.320.000,- dengan realisasi Rp.36.034.228,- persentase keuangan 89.37 %, keluarannya berupa terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan aparatur.

#### b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.100.000,- dengan realisasi Rp.82.700.000,- persentase keuangan 98,34 %, keluarannya berupa terlaksananya honor pengelola program / kegiatan, hasilnya yaitu lancarnya pelaksanaan program / kegiatan kantor.

#### c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 151.518.500,- dengan realisasi Rp.151.496.000,- persentase keuangan 99,99 %, keluarannya berupa terciptanya kebersihan lingkungan kantor, hasilnya yaitu meningkatnya kebersihan kantor.

# d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.800.00,- dengan realisasi Rp. 15.800.00,- persentase keuangan 100 %, keluarannya berupa

terlaksananya pemeliharaan peralatan, hasilnya yaitu berfungsinya peralatan kantor secara optimal.

# e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.040.000,- dengan realisasi Rp. 32.024.000,- persentase keuangan 99,95 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian alat tulis kantor, hasilnya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

# f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.922.000,- dengan realisasi Rp. 23.865.250,- persentase keuangan 99,76 %, keluarannya berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan, hasilnya berupa meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.665.500,- dengan realisasi Rp. 18.531.000,- persentase keuangan 99,28 %, keluarannya yaitu terlaksananya pembelian / pemasangan komponen instalasi listrik, hasilnya berupa tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor.

#### h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.100.000,- dengan realisasi Rp. 35.800.00,- persentase keuangan 99,17 %, keluarannya berupa penambahan sarana dan prasarana kantor, hasilnya yaitu terlaksananya pembelian peralatan kantor.

#### i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- dengan realisasi Rp.18.240.000,- persentase keuangan 91,11 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian bahan bacaan, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan aparatur tentang informasi terbaru.

#### j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.050.000,- dengan realisasi Rp.25.742.500,- persentase keuangan 98,82 %, keluarannya berupa terlaksananya pembelian makanan dan minuman, hasilnya yaitu adanya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.

#### k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.675.000,- dengan realisasi Rp. 43.485.080,- persentase keuangan 99,57 %, keluarannya berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

#### 1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.125.000,- dengan realisasi Rp. 79.030.000,- persentase keuangan 99,88 %, keluarannya berupa koordinasi dan konsultasi dalam daerah, hasilnya yaitu meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

# m. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.972.800,- dengan realisasi Rp.39.941.400,- persentase keuangan 99,92 %, keluarannya

berupa terpenuhinya operasional perencanaan dan keuangan, hasilnya yaitu meningkatnya perencanaan dan pelaporan yang efektif serta tepat waktu dengan instansi terkait.

#### 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 120.526.000,- dengan realisasi Rp. 120.232.724,- persentase keuangan 99,76 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa pemeliharaaan kendaraan dinas serta terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

#### a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.850.000,- dengan realisasi Rp.23.832.272,- persentase keuangan 99,93 %, keluarannya berupa terpeliharanya gedung kantor, hasilnnya yaitu terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor.

# b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.676.000,- dengan realisasi Rp.96.400.452,- persentase keuangan 99,71 %, keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas kantor, hasilnnya berupa terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor.

# 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 0,- dengan realisasi Rp.0,- persentase keuangan 0 %, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu:

#### a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi Rp.0,- persentase keuangan 0 %, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

# 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 247.403.400,- dengan realisasi Rp. 240.982.515,- persentase keuangan 97,40 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya promosi dan kegiatan pameran investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yaitu:

#### a. Promosi Investasi di Dalam Negeri

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 161.161.500,- dengan realisasi Rp. 159.938.065,- persentase keuangan 99,24 %, keluarannya berupa terlaksananya keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada pameran investasi, hasilnya yaitu meningkatnya investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini yaitu melakukan promosi dengan cara ikut serta pada pameran- pameran seperti Festival Langkisau, Sumbar Expo, Pesona Ranah Minang dan pameran-pameran lainnya.

#### 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 124.285.500,- dengan realisasi Rp. 123.660.300,- persentase keuangan 99,50 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKPM Provinsi, Terlaksananya Operasional Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yaitu:

#### a. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.612.500,- dengan realisasi Rp. 30.611.750,- persentase keuangan 96,83 %, keluarannya berupa terselenggaranya pendataan investasi non fasilitas Rumah Tangga, hasilnya tersedianya data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

Kegiatan ini yaitu melakukan pendataan investasi non fasilitas dan Rumah Tangga ke kecamatan-kecamatan kemudian di buat menjadi sebuah buku yang berisikan data-data investasi non fasilitas dan rumah tangga.

#### b. Koordinasi Bidang Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.209.000,- dengan realisasi Rp. 22.723.650,- persentase keuangan 97,91 %, keluarannya koordinasi bidang penanaman modal ke BKPM RI, hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan di Bidang Penanaman Modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi ke BKPM Provinsi maupun ke BKPM Pusat mengenai penanaman modal.

#### c. Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.283.600,- dengan realisasi Rp. 55.201.200,- persentase keuangan 99,85 %, keluarannya berupa terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal, hasilnya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal. Kegiatan ini yaitu melaksanakan pelayanan penanaman modal, melakukan survey lapangan bersama tim teknis perizinan untuk mencek / merekomendasi permohonan perizinan penanaman modal yang diajukan.

# d. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.792.900,- dengan realisasi Rp. 45.735.450,- persentase keuangan 99,87 %, keluaranya berupa terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap penanaman modal.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 6. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 302.035.600,- dengan realisasi Rp. 362.033.671,- persentase keuangan 77,73 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Adapun kegiatan pada Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan yaitu:

#### a. Operasional Penyelenggaraan Perizinan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 111.033.000,- dengan realisasi Rp.110.676.852,- persentase keuangan 99,68 %, keluaranya berupa terselenggaranya penerbitan izin sesuai dengan SOP, hasilnya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan. Kegiatan ini yaitu kegiatan pelayanan perizinan dan cetak blanko-blanko izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

# b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.044.000,- dengan realisasi Rp. 74.421.100,- persentase keuangan 99,17 %, keluaranya berupa terpantau / terbinanya perusahaan yang telah habis masa berlaku izinnya, hasilnya yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Kegiatan ini yaitu melakukan monitoring terhadap usaha-usaha yang akan atau telah habis masa berlaku izinnya, dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang telah memperjang izinnya.

#### 7. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 66.267.500,- dengan realisasi Rp. 65.974.450,- persentase keuangan 99,54 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya Publikasi Perizinan dalam bentuk Bilboard, leaflet pamflet dan brosur.

Adapun kegiatan pada Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal yaitu:

#### a. Publikasi Perizinan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.267.500,- dengan realisasi Rp. 65.974.450,- persentase keuangan 99,54 %, keluarannya berupa pencetakan media informasi pelayanan perizinan, hasilnya yaitu meningkatnya informasi penanaman modal.

Kegiatan ini berupa pembuatan media informasi perizinan berupa leaflet, pamplet, brosur dan Bilboard.

# Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 1.489.039.468 terurai dalam 7 Program dan 27 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 99 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai "Pelayanan Perizinan".

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- 1. Keterbatasan data dan informasi;
- 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
- 3. Belum optimalnya koordinasi;
- 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan;
- Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

TABEL 2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Pesisir Selatan

			U	RUSAN/BIDANG URUSAN			RENCANA TAH	UN 2021			PERKIRAAN MAJU 20	
	KODI	E		EMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				870,265,500				958,000,000
		1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	44,000,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	45,000,000
		2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	82,700,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiata n	90,000,000
		3	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	151,500,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	170,000,000
		4	10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	15,200,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	28,000,000
		5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	32,324,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	55,000,000

6	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	24,870,700	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	30,000,000
7	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	27,270,300	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	35,000,000
8		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000
9	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	20,000,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	25,000,000
10	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	32,400,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	35,000,000
11	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negri)	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	250,000,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	250,000,000
12	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	80,000,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	85,000,000
13	27	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	45,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya Operasional perencanaan	45,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				342,250,000				360,000,000

	14		Pengadaan Mobileur	Tersedianya kebutuhan meubileur	IV Jurai	Unit	35,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan moileur	50,000,000
	15		Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	IV Jurai	2 unit	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	60,000,000
	16	22	Pemeiliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruangan	97,250,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	100,000,000
	17	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	IV Jurai	1 mobil dinas, 3 buah kendaraan dinas roda 2	150,000,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	150,000,000
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23,500,000				25,000,000
	18		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas operasional pelayanan, harian, hari tertentu, olah raga	23,500,000	APBD	baru	Tersedianya pakaian dinas	25,000,000
4			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				50,000,000
	19	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan	IV Jurai	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000
5			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				735,562,500				805,000,000
	20		Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi serta event promosi	LuarDaera h	5 Kali Promosi	280,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	280,000,000

	21		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	5 buah Mou	47,000,000	APBD	baru	Terciptanya kerjasama investasi	65,000,000
	21	13	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	4 Investor	35,000,000	APBD	baru	6 Investor	60,000,000
	21		Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Vidio Promosi/film/baliho	Pessel	3 paket	125,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	150,000,000
	21		Pemutakhiran data dan Informasi Perizinan	Tersedianya informasi data perizinan	Pessel	Buku data Informasi	248,562,500	APBD	baru	Tersedianya data informasi	250,000,000
6			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				797,959,800				842,639,400
	22		Penyusunan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	120,000,000	APBD	Berkelanj utan	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	150,000,000
	23		Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	Kab. Pessel	30 PMDN dan PMDA	187,959,800	APBD	Berkelanj utan	Terlaksananya fasilitasi layanan	197,639,400
	24		Pengelolaan System Informasi Pelayanan melalui jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	80,000,000	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	85,000,000
	25		Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	Kab. Pessel	20 investor	80,000,000	APBD	Berkelanj utan	Terlaksananya Pengawasan investasi	80,000,000

	26	Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi	Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri	Kab. Pessel	percepatan Pengurusan Izin melalui aplikasi	180,000,000	APBD	baru	Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri	180,000,000
	27	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	1 buah	150,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya SOP Perizinan	150,000,000
7		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizian yang di terbitkan	Pessel	3000 buah Izin	1,200,000,000				1,200,000,000
	28	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	Pessel	Tersedianya Quisioner Kepuasan Masyarakat	65,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner Kepuasan Masyarakat	65,000,000
	29	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	150,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	150,000,000
	30	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamata n	180 Peserta	135,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	135,000,000
	31	Optimalisasi Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile	tersedianya Sistem informasi Pelayanan Mobile	Kab. Pessel	1 Aplikasi Mobile	700,000,000	APBD	baru	Terlaksananya Pelayanan Informasi Mobile	700,000,000
	32	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	3.000 buah izin	150,000,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	150,000,000
		TOTAL				4,019,537,800				4,240,639,400

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

No	Program /Kegiata	ın	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)

Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2019 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

							Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja		isasi kinerja pro tan tahun 2018		Target program		lisasi Capaian ra Perangkat tahun 2019
		Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)	dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realiasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat capaian realisasi target Renstra
		1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wajib Non Pelayanan Dasar										
			1											
1	02	03	01		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

1	02	03	01	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	17	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	01	20	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	02		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negri)	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	02	09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	02	10	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	02	03	02	24	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
1	02	03	02	26	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									

1	02	03	05		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan		-	100%	100%	100%	-	-	-
1	02	03	16		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
1	02	03	16	01	Promosi Investasi di Dalam negri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi								
1	02	03	16	44	Pendataan realisasi investasi non fasilitasi dan rumah tangga	Tersedianya informasi data perizinan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	16	45	Pelayanan kerjasama investasi	terlaksananya kerjasama dengan investor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	16	52	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
1	02	03	16	53	Penyusunan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	16	64	Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	16	68	Pengembangan System Informasi Pelayanan melalui jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	16	69	Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17		Koordinasi Bidang Penanaman Modal	Tercapainya koordinasi bidang penanaman modal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

	1	i	i	i .					i i	i	ı		i	i i
1	02	03	17	05	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	06	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	07	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	08	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	17	Penyelesian permasalahan pengaduan perizinan	tercapainya penuntasan masalah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	21	Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	03	17	22	ProgramPeningkatan Daya Saing Penanaman modal									
1	02	03	17	23	Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN SASARAN DPMPPTSP

#### 3.1 Tujuan dan Telaahan terhadap kebijakan nasional

# a. Tujuan

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategi lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sau Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- Memperjelas arah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memberikan transparansi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Mengadakan evaluasi kegiatan.
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi.
- Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan aparatur negara.

#### 3.2 Sasaran, Rencana Kerja DPMPPTSP

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran strategis yang difokuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yaitu:

- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dalam proses pelayanan.
- Terciptanya wadah pelayanan yang akurat serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
- Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

# I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 4. Penyediaan alat tulis kantor.
- 5. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan.

- 6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
- 9. Penyediaan makanan dan minuman.
- 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah..
- 12. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.
- 13. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 14. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

#### 1. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

- 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 5. Pengadaan Moubiller.

#### III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

#### IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
- 2. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
- 3. Pengadaan pakaian Khusus pelayanan.

# V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1. Promosi Investasi di Dalam Negeri
- Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

- 4. Pengembangan potensi unggulan daerah
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- 6. Sosilisasi penyelenggara perizinan
- 7. Pengembangan potensi unggulan daerah
- 8. Penyelenggara pameran investasi
- 9. Pelayanan kerjasama investasi
- 10. Pembuatan bukusaku, pamflet, brosur investasi dan perizinan
- 11. Informasi dan data perizinan
- 12. Pendataan investasi UMKM

#### VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
- 2. Kajian kebijakan penanaman modal
- 3. Pengembangan sistem perizinan nasional
- 4. Penyederhanaan perizinan investasi
- 5. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
- 6. Pelayanan penanaman modal
- 7. Promosi dan publikasi peluang investasi
- 8. Penyusunan buku data perkembangan investasi
- 9. Pembinaan dan Penyuluhan penanaman modal
- 10. Lokakarya penyusunan LKPM
- 11. Pengembangan System informasi penamanan modal
- 12. Pembuatan buku frofil dan potensi investasi
- 13. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
- 14. Pembangunan sistem pelayanan prima
- 15. Koordinasi bidang penanaman modal
- 16. Sosialisasi kepada Investor dan UMKM
- 17. Gelar potensi dan temu usaha
- 18. Inventarisir data peluang investasi
- 19. Kendaraan operasional dan kendaraan pelayanan

- 20. Pendataan realisasi investasi non fasilitasi dan rumah tangga
- 21. Penyusunan kebijakn investasi bagi pembangunan fasilitasi infrastruktur
- 22. Pengembangan sistem informasi perizinan Pelayanan melalui Jaringan Aplikasi penanaman modal

# VII. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

- 1. Survey indek kepuasan masyarakat
- 2. Sosialisasi Perbup nomor 23 tahun 2013 dan SOP Pelayanan
- 3. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
- 4. Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan
- 5. Penyelesian permasalaahan pengaduan perizinan
- 6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
- 7. Operasional penyelengara perizinan

# VIII. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;

- 1. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian masalah investasi
- 2. Sosialisasi kebijakan penanaman modal
- 3. Penyusunan SOP
- 4. Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar Nasional
- 5. Publikasi perizinan penanaman modal
- 6. Penyederhanaan perizinan Investasi

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut

# RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN OPD TAHUN 2021 e- PLANNING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

			U	RUSAN/BIDANG URUSAN			RENCANA TAH	IUN 2021			PERKIRAAN MAJU 20	
	KOD	DΕ	Pi	EMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				870,265,500				958,000,000
		1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	44,000,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	45,000,000
		2	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksana Program/Kegiatan	82,700,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya pelaksanaan Program/Kegiata n	90,000,000
		3	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	IV Jurai	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	151,500,000	APBD	Rutinitas	Lancarnya Pelaksanaan Kebersihan Kantor	170,000,000
		4		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	IV Jurai	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	15,200,000	APBD	Rutinitas	Service Komputer, Laptop, Printer, Mesin Tik, Ginset, dan AC	28,000,000
		5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	32,324,500	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	55,000,000

6	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	IV Jurai	Lancarnya Operasional Kantor	24,870,700	APBD	Rutinitas	Lancarnya Operasional Kantor	30,000,000
7	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Kantor	IV Jurai	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering, Stop Kontak	27,270,300	APBD	Rutinitas	Lampu Pijar, Neon, Baterai Kering	35,000,000
8		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000	APBD	Rutinitas	Almari Arsip, Meja, Kursi, Meja rapat,	65,000,000
9	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	4 eksp koran	20,000,000	APBD	Rutinitas	4 eksp koran	25,000,000
10	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya Makan, Minum Rapat dan Tamu Kantor	IV Jurai	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	32,400,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	35,000,000
11	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (luar negri)	Terbayarnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah apartur kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	250,000,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	250,000,000
12	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Bagi Apartur Kantor	Kab. Pessel	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	80,000,000	APBD	Rutinitas	Terbayarnya Biaya Perjalanan Dinas	85,000,000
13	27	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Tersedianya Operasional perencanaan	IV Jurai	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	45,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya Operasional perencanaan	45,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				342,250,000				360,000,000

	14		Pengadaan Mobileur	Tersedianya kebutuhan meubileur	IV Jurai	Unit	35,000,000	APBD	kegiatan baru	tersedianya kebutuhan moileur	50,000,000
	15		Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2	IV Jurai	2 unit	60,000,000	APBD	Rutinitas	Tersedianya tambahan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	60,000,000
	16	22	Pemeiliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	IV Jurai	Terlaksananya Penamabahan Ruangan	97,250,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pemeliharaan kantor	100,000,000
	17	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	IV Jurai	1 mobil dinas, 3 buah kendaraan dinas roda 2	150,000,000	APBD	Rutinitas	Terpeliharanya 1 unit mobil dinas dan 3 unit kendaraan roda 2	150,000,000
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				23,500,000				25,000,000
	18		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	IV. Jurai	Tersedianya pakaian dinas operasional pelayanan, harian, hari tertentu, olah raga	23,500,000	APBD	baru	Tersedianya pakaian dinas	25,000,000
4			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000				50,000,000
	19	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur Perizinan	IV Jurai	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya Pendididkan dan pelatihan Formal	50,000,000
5			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				735,562,500				805,000,000
	20		Promosi Investasi di Dalam negeri dan luar Negeri	Terlaksananya Promosi Investasi serta event promosi	LuarDaera h	5 Kali Promosi	280,000,000	APBD	Rutinitas	Terlaksananya Promosi Investasi	280,000,000

	21		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terciptanya kerjasama investasi	Investor	5 buah Mou	47,000,000	APBD	baru	Terciptanya kerjasama investasi	65,000,000
	21	13	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid p. modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tercapainya kerjasama dengan investor	Pessel	4 Investor	35,000,000	APBD	baru	6 Investor	60,000,000
	21		Publikasi Perizinan Penanaman Modal	Vidio Promosi/film/baliho	Pessel	3 paket	125,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksana Informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal di kab.pesisir selatan	150,000,000
	21		Pemutakhiran data dan Informasi Perizinan	Tersedianya informasi data perizinan	Pessel	Buku data Informasi	248,562,500	APBD	baru	Tersedianya data informasi	250,000,000
6			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				797,959,800				842,639,400
	22		Penyusunan sistem informasi perizinan dan penanaman modal di daerah	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	Kab. Pessel	Aplikasi	120,000,000	APBD	Berkelanj utan	Tersedianya Sitem informasi penanaman modal daerah	150,000,000
	23		Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya fasilitasi layanan	Kab. Pessel	30 PMDN dan PMDA	187,959,800	APBD	Berkelanj utan	Terlaksananya fasilitasi layanan	197,639,400
	24		Pengelolaan System Informasi Pelayanan melalui jaringan Aplikasi Penanaman Modal	Tersedianya sistem informasi	Kab. Pessel	Informasi izin	80,000,000	APBD	Baru	Tersedianya sistem informasi	85,000,000
	25		Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Terlaksananya Pengawasan investasi	Kab. Pessel	20 investor	80,000,000	APBD	Berkelanj utan	Terlaksananya Pengawasan investasi	80,000,000

	26	Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi	Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri	Kab. Pessel	percepatan Pengurusan Izin melalui aplikasi	180,000,000	APBD	baru	Tersedianya peralatan aplikasi perizinan mandiri	180,000,000
	27	Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional	Tersedianya SOP Perizinan	Kab. Pessel	1 buah	150,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya SOP Perizinan	150,000,000
7		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizian yang di terbitkan	Pessel	3000 buah Izin	1,200,000,000				1,200,000,000
	28	Survey indek kepuasan masyarakat	Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat bidang perizinan	Pessel	Tersedianya Quisioner Kepuasan Masyarakat	65,000,000	APBD	lanjutan	Tersedianya Quisioner Kepuasan Masyarakat	65,000,000
	29	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring kegiatan	Pessel	50 izin	150,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya monitoring kegiatan	150,000,000
	30	Sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya sosialisasi	kecamata n	180 Peserta	135,000,000	APBD	lanjutan	Terlaksananya sosialisasi	135,000,000
	31	Optimalisasi Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile	tersedianya Sistem informasi Pelayanan Mobile	Kab. Pessel	1 Aplikasi Mobile	700,000,000	APBD	baru	Terlaksananya Pelayanan Informasi Mobile	700,000,000
		Operasional Penyelenggara Perizinan	Terlaksananya Operasional pelayanan	Pessel	3.000 buah izin	150,000,000	APBD	lanjutan	1500 bahan layanan izin	150,000,000
		TOTAL				4,019,537,800				4,240,639,400

#### **BAB IV**

#### PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan serta mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, Kegiatan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.